

MARYANE EFLIANI DHAENG

by UNITRI Press

Submission date: 01-May-2023 09:26AM (UTC+0700)

Submission ID: 2008122493

File name: MARYANE_EFLIANI_DHAENG.docx (632.28K)

Word count: 1077

Character count: 7340

**ANALISIS PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
KEPANJEN KABUPATEN MALANG**

PROPOSAL SKRIPSI

AKUNTANSI



**OLEH:
MARYANE EFLIANI DHAENG
NIM: 2019110180**

**UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
FAKULTAS EKONOMI
MALANG
2023**

RINGKASAN

Tujuan dari penyelidikan ini adalah untuk melihat bagaimana daerah setempat mempengaruhi pembayaran ini serta interaksi pemungutan biaya tanah dan konstruksi. Pemeriksaan dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang yang berkedudukan di Jawa Timur di Jl. Penelitian ini harus diselesaikan agar Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang dapat lebih memahami, mengkaji, serta lebih mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya tersebut. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dan deskriptif. Informasi diperoleh dengan menggunakan prosedur pelaporan dan pemeriksaan dari pendekatan tersebut di atas. Hasil studi menunjukkan bahwa metode pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang mudah digunakan dan mematuhi semua undang-undang yang berlaku. Organisasi Pendapatan Provinsi Rezim Malang masih kekurangan partisipasi daerah, terlihat dari pembayaran iuran tanah dan pembangunan yang tidak sesuai dengan harapan.

Kata kunci : Prosedur, Pemungutan, Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kemerdekaan adalah sarana untuk mencapai tujuan lain bagi rakyat Indonesia, bukan tujuan akhir mereka. Dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menegakkan pemerintahan yang memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan penduduknya, membela Indonesia dan segala pertumpahan darah yang dilakukan di Indonesia, serta ikut serta dalam perjuangan rakyat. Nilai-nilai negara Indonesia dengan membangun bangsa secara berkelanjutan di segala bidang kehidupan. Ini adalah rantai pembangunan yang terkoordinasi dengan baik dan menyeluruh. Pelaksanaan usaha pembangunan ini akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Pajak merupakan sumber pendanaan negara untuk infrastruktur dan pengeluaran pemerintah lainnya.

¹⁰ Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak harus dibayarkan kepada negara karena uang diperoleh secara tidak langsung dan digunakan untuk keuntungan negara guna memaksimalkan potensi kemakmuran rakyat. Karena kerusakan sosial dan ketidaksetaraan secara inheren tidak diinginkan di semua negara, pajak bermanfaat untuk mendorong peningkatan kesejahteraan bersama. Akibatnya, setiap tahun pemerintah akan berupaya meningkatkan pemungutan pajak.

¹³ Biaya dipecah menjadi dua kelompok tergantung pada jenis organisasi: pengeluaran regional dan tanggung jawab tambahan yang ditargetkan. Melalui DJP (Direktorat Jenderal Pajak) Kementerian Keuangan, pemerintah secara langsung mengelola pajak pusat atau sering disebut pajak negara. Manfaat dan/atau peningkatan status sosial ekonomi bagi mereka yang berhak. Untuk menyeimbangkan manfaat yang ditawarkan kepemilikan properti kepada masyarakat umum, pemerintah mengenakan pungutan yang dikenal sebagai pungutan Tanah dan Bangunan.

Kabupaten Malang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, artinya banyak penduduk dan pemilik usaha di sana. Kabupaten-kabupaten di Jawa Timur dipercaya untuk mengawasi dan mengurus sumber-sumber pendapatan daerah keluarganya sendiri, khususnya pajak bumi dan bangunan. Manajemen dan administrasi yang lebih internal diperlukan karena dampak signifikan dari pajak bumi dan konstruksi terhadap efektivitas pembangunan daerah. Di setiap daerah, penanganan dan pengelolaan ini dimaksudkan untuk mendorong partisipasi pemerintah dan masyarakat yang efektif dalam pembiayaan pembangunan. Memodernisasi sistem perpajakan dengan memperkenalkan komputerisasi, meningkatkan standar karyawan, dan menerapkan sistem pengumpulan pajak yang sesuai dengan semua peraturan dan ketentuan

untuk meningkatkan pengumpulan pajak. Tabel berikut menampilkan pengakuan penggunaan dan biaya tanah dan bangunan di bawah Rezim Malang.

4
Tabel 1.1 : Target dan realisasi Pajak Bumi dan bangunan Kabupaten Malang

Tahun	Target (Juta Rupiah)	Realisasi (Juta Rupiah)
2017	50.000,00	95.301,78
2018	63.800,00	63.089,07
2019	64.000,00	72.222,42
2020	73.000,00	110.255,39

3
Sumber:Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Malang 2021

Pemungutan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Malang tahun 2018 seperti terlihat pada tabel di atas masih jauh dari harapan. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang secara konsisten melampaui target, kecuali beberapa tahun yang berubah dari tahun ke tahun. Penerimaan dari retribusi bumi dan bangunan seringkali terus meningkat bahkan setelah mengalami kegagalan dan penurunan yang berkepanjangan. Badan Pendapatan Daerah Rezim Provinsi Malang, organisasi yang bertugas mengelola pendapatan dari penjualan tanah dan biaya konstruksi, harus mendapatkan pertimbangan khusus dalam konteks ini. Ada persoalan yang membatasi pilihan pemekaran Kabupaten Malang jika melihat potensi pembangunan berbagai struktur, termasuk restoran, kompleks ritel, dan institusi lainnya. Pembangunan daerah yang berkelanjutan dan meluas merupakan elemen kunci yang mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli. Tingkat perolehan dan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan yang relatif tinggi, keduanya menyoroti potensi besar yang ada, menjadi bukti kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola dan memungut pajak ini secara efisien. Masalahnya adalah apakah langkah yang tepat telah diambil saat menjumlahkan biaya konstruksi dan area.

¹⁴ Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengambil judul “ANALISIS PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK KEPANJEN KABUPATEN MALANG”.

2. Fokus Penelitian

¹ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah.

3. Rumusan Masalah

Masalah ini dapat dinyatakan sebagai berikut mengingat konteks sebelumnya.

- ² 1. Bagaimana Proses Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Kapanjen Kabupaten Malang?
- ¹² 2. Bagaimana cara Kantor Pelayanan Pajak Kapanjen Kabupaten Malang meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan?

4. Tujuan Penelitian

Penulis berharap dapat mencapai hal-hal berikut dengan rekomendasi ini:

- ² 1. Apakah anda mengetahui Proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Kapanjen Kabupaten Malang?
- ⁹ 2. Mengetahui cara meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Kapanjen Kabupaten Malang.

5. Paradigma Penelitian

Sebuah studi ilmiah dapat dibenarkan jika menggunakan teknik yang didukung oleh studi penelitian. Metodologi penelitian adalah metode untuk menemukan kebenaran dengan menggunakan bukti yang cukup dengan cara yang dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam penelitian yang berfokus pada fenomena sosial ini, peneliti menggunakan teknik deskriptif kualitatif untuk menggambarkan atau menjelaskan sesuatu yang kemudian diklasifikasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mempermudah penelitian dan observasi yang diperlukan untuk tugas akhir.

6. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoris.

1. Bagi peneliti

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana cara Kantor Pelayanan Pajak memungut pajak bumi dan bangunan.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Kajian ini akan menjadi bacaan tambahan bagi mahasiswa serta memberikan mereka ide untuk penelitian di masa depan di bidang yang sama, termasuk pemeriksaan metode Kantor Wilayah untuk mengumpulkan pajak bumi dan bangunan.

b. Manfaat Akademis

Dengan kajian ini, penulis berusaha memberikan gambaran bagaimana pemungutan pajak bumi dan bangunan bagi kalangan akademisi dan masyarakat umum.

c. Manfaat Praktis

Kajian ini dapat dijadikan sebagai evaluasi bagaimana memperbaiki proses pemungutan dan mampu meningkatkan penerimaan pajak melalui pemungutan yang tepat pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malang. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja pemungutan pajak bumi dan bangunan.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memastikan bahwa peneliti tetap pada jalur dengan tujuan mereka, penelitian ini mencoba untuk menetapkan seberapa luas temuan penelitian dapat digunakan.

Pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang

dan keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut merupakan satu-satunya subjek penelitian ini.

MARYANE EFLIANI DHAENG

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	2%
2	Mochammad Eko S. Kamba, David P.E. Saerang, Rudy J. Pusung. "EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BITUNG", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2013 Publication	2%
3	adoc.pub Internet Source	2%
4	eprints.untirta.ac.id Internet Source	1%
5	id.scribd.com Internet Source	1%
6	ejournal.bsi.ac.id Internet Source	1%
7	ejournal.uniks.ac.id Internet Source	1%

8	123dok.com Internet Source	1 %
9	e-perpus.unud.ac.id Internet Source	1 %
10	id.123dok.com Internet Source	1 %
11	text-id.123dok.com Internet Source	1 %
12	jurnal.unigal.ac.id Internet Source	1 %
13	Hamzah Firmansyah, Hadian Nurdiana. "EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI DESA PADAMUKTI TAHUN 2018–2020", Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan, 2022 Publication	1 %
14	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

MARYANE EFLIANI DHAENG

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7
